

# **IMPLEMENTASI HUMAN SECURITY: PERSPEKTIF MANAJEMEN POPULASI TERHADAP KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**

Vieraninditha Adinda Nailla

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan  
Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Kec. Cidadak, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40141

**Email:** [8052301021@student.unpar.ac.id](mailto:8052301021@student.unpar.ac.id)

## ***Abstract***

---

Indonesia, as the fourth most populous country in the world, faces complex challenges in managing population dynamics that directly impact national stability. This study analyzes the implementation of human security in Indonesia's population policy from a population management perspective on economic, social, and cultural resilience. Using a literature review method with a qualitative-descriptive approach, this study explores the integration of the people-centered security concept in the context of Indonesia's demographic transition, which is undergoing a second demographic transition. The findings show that although Indonesia has an adequate regulatory framework, there are still significant gaps in operationalizing the principles of human security, which include freedom from fear and freedom from want. Existing population policies have not fully accommodated the dimensions of economic security, community security, political security, and cultural security, as reflected in the fragmentation of policy approaches and weak cross-sectoral coordination. An integrative human security implementation model through adaptive population governance shows great potential in optimizing the demographic dividend and mitigating the risks of the demographic burden. The implementation of this model contributes significantly to strengthening economic resilience through sustainable economic growth, social resilience through community empowerment, and cultural resilience through the preservation of identity in the era of globalization. The interconnectedness between the three pillars of resilience creates a multiplier effect that strengthens Indonesia's national resilience system in facing future demographic challenges.

**Keywords:** Human Security; Population Policy; Population Management; National Resilience; Demographic Transition.

## ***Abstrak***

---

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat dunia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola dinamika kependudukan yang berdampak langsung terhadap stabilitas nasional. Penelitian ini menganalisis implementasi human security dalam kebijakan

kependudukan Indonesia dengan perspektif manajemen populasi terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi integrasi konsep *people-centered security* dalam konteks transisi demografis Indonesia yang mengalami *second demographic transition*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang memadai, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip *human security* yang mencakup *freedom from fear* dan *freedom from want*. Kondisi *existing* kebijakan kependudukan belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi *economic security*, *community security*, *political security*, dan *cultural security*, yang tercermin dari fragmentasi pendekatan kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas-sektor. Model implementasi *human security* yang integratif melalui *adaptive population governance* menunjukkan potensi besar dalam mengoptimalkan *demographic dividend* dan memitigasi risiko *demographic burden*. Implementasi model ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan ekonomi melalui *sustainable economic growth*, ketahanan sosial melalui *community empowerment*, dan ketahanan budaya melalui pelestarian identitas dalam era globalisasi. *Interconnectedness* antara ketiga pilar ketahanan menciptakan *multiplier effect* yang memperkuat sistem ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan demografis masa depan.

**Kata Kunci:** Human Security; Kebijakan Kependudukan; Manajemen Populasi; Ketahanan Nasional; Transisi Demografis.

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola dinamika kependudukan yang berdampak langsung terhadap stabilitas nasional. Dalam konteks transisi demografis, Indonesia mengalami fenomena *second demographic transition* yang ditandai dengan perubahan pola fertilitas, pernikahan, dan struktur keluarga yang mempengaruhi kohesi sosial dan ketahanan nasional <sup>1</sup>. Konsep *human security* yang pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1994, menekankan pentingnya keamanan individu yang mencakup dimensi ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik, menjadi relevan dalam konteks kebijakan kependudukan Indonesia yang tengah mengalami transformasi demografis signifikan dengan berbagai implikasi terhadap keamanan manusia <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ariane Utomo dkk., "A second demographic transition in Indonesia?," *China Population and Development Studies* 6, no. 3 (2022): 288–315, <https://doi.org/10.1007/s42379-022-00115-y>.

<sup>2</sup> Erwin Nur Rif'ah, "Freedom or Restraint: Redefining the Concept of Human Security within the Indonesian Muslim Community," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 1, no. 2 (2018): 192, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v1i2.6131>.

Kebijakan kependudukan Indonesia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan bonus demografi yang diprediksi berlangsung hingga tahun 2030, dimana sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi signifikan namun memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak menjadi beban demografis<sup>3</sup>. Implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan struktural dalam mengakomodasi prinsip-prinsip *human security* yang mengutamakan *people-centered security* dibandingkan pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada negara. Kondisi ini tercermin dari kompleksitas dalam mengintegrasikan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, meskipun Indonesia telah membangun fondasi sistem perlindungan sosial melalui mekanisme formal dan informal<sup>4</sup>. Paradoks ini menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan kependudukan yang tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif populasi, tetapi juga kualitas hidup dan keamanan manusia sebagai inti dari pembangunan berkelanjutan.

Fenomena transisi demografis Indonesia menunjukkan karakteristik yang unik dimana terjadi perubahan signifikan dalam pola fertilitas di bawah tingkat penggantian di beberapa wilayah, peningkatan usia pernikahan pertama, tingkat perceraian, dan diversifikasi bentuk rumah tangga yang mencerminkan heterogenitas ekonomi, budaya, dan demografis di berbagai daerah<sup>5</sup>. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek *human security* seperti *community security*, *political security*, dan *cultural security* menghadapi tantangan kompleks dalam konteks kebijakan kependudukan yang masih memerlukan adaptasi terhadap dinamika sosial kontemporer. Lebih lanjut, struktur penduduk Indonesia yang mengalami transformasi demografis membutuhkan paradigma baru yang mengintegrasikan keamanan manusia sebagai landasan *sustainable*

---

<sup>3</sup> Willya Achmad dkk., "Taking Advantage Of Indonesia's Demographic Bonus In 2024: Challenges And OpportuniAes Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Di Tahun 2024: Tantangan Dan Peluang," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 2 (2024): 4425–34.

<sup>4</sup> Gusti Ayu Ketut Surtiari dkk., "Indonesia's social protection system: the relevance of informal social protection to strengthen adaptation to climate change," *Journal of Integrative Environmental Sciences* 21, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/1943815X.2024.2375995>.

<sup>5</sup> Utomo dkk., "A second demographic transition in Indonesia?"

*population development*, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial-ekonomi masyarakat <sup>6</sup>.

Dimensi hukum dalam implementasi *human security* menjadi aspek krusial mengingat kerangka regulasi kependudukan Indonesia masih perlu penguatan dalam mengakomodasi hak-hak fundamental masyarakat, khususnya dalam konteks kebebasan dan pembatasan yang berkaitan dengan identitas keagamaan dan kultural masyarakat Muslim Indonesia <sup>7</sup>. Tantangan ini semakin kompleks dengan munculnya dilema keamanan manusia dalam sektor ekonomi, dimana ekspansi industri perkebunan kelapa sawit sebagai sumber ekonomi nasional justru menimbulkan kontroversi lingkungan, kesehatan, dan sosial yang bertentangan dengan prinsip *human security* <sup>8</sup>. Kondisi ini memperlihatkan gap antara aspirasi kebijakan kependudukan yang inklusif dengan realitas implementasi yang masih menghadapi tantangan struktural dalam menjamin keamanan manusia secara menyeluruh, yang mencakup *freedom from fear* dan *freedom from want*.

Tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan volatilitas ekonomi menuntut Indonesia untuk mengadopsi pendekatan *adaptive population governance* yang menempatkan *human security* sebagai *core principle* dalam setiap formulasi kebijakan kependudukan. Sistem perlindungan sosial Indonesia yang menggabungkan mekanisme formal dan informal menunjukkan relevansi yang tinggi dalam mempertahankan adaptasi terhadap perubahan iklim, namun memerlukan penguatan kapasitas untuk mengintegrasikan berbagai dimensi *human security* dalam satu kerangka yang koheren <sup>9</sup>. Kompleksitas ini semakin terlihat dalam konteks pencarian solusi berkelanjutan bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dimana pendekatan keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia harus diintegrasikan untuk memastikan implementasi

---

<sup>6</sup> Dewie Mardhani dkk., "Security and Defense in National Resilience Studies To Realize a National Security System," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 10, no. 3 (2020): 267, <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.1112>.

<sup>7</sup> Rif'ah, "Freedom or Restraint: Redefining the Concept of Human Security within the Indonesian Muslim Community."

<sup>8</sup> Dwi Ardiyanti dan Ahmad Anwar, "The Dilemma of Human Security on Palm Oil Plantation in Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.18196/hi.71125>.

<sup>9</sup> Surtiari dkk., "Indonesia's social protection system: the relevance of informal social protection to strengthen adaptation to climate change."

prinsip *non-refoulement* dan perlindungan keamanan manusia yang komprehensif <sup>10</sup>.

Perspektif manajemen populasi yang mengintegrasikan *human security* tidak hanya berimplikasi pada aspek demografis semata, tetapi juga pada ketahanan ekonomi nasional yang dihadapkan pada tantangan *demographic transition* dan *economic structural transformation*. Bonus demografi yang saat ini dinikmati Indonesia berpotensi menjadi *demographic burden* apabila tidak dikelola dengan pendekatan yang menempatkan keamanan manusia sebagai prioritas utama, mengingat periode 2020-2030 merupakan fase kritis dimana Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan <sup>11</sup>. Kondisi ini mengharuskan adanya *paradigm shift* dalam kebijakan kependudukan dari pendekatan *state-centric security* menuju *human-centric security* yang mengakui bahwa keamanan negara sejatinya terbangun dari keamanan individu dan komunitas, terutama dalam menghadapi heterogenitas demografis, ekonomi, dan budaya yang menjadi karakteristik Indonesia <sup>12</sup>.

Urgensi penelitian tentang implementasi *human security* dalam kebijakan kependudukan Indonesia menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas tantangan kontemporer yang dihadapi bangsa Indonesia. Integrasi antara manajemen populasi dan keamanan manusia memerlukan kajian mendalam untuk menghasilkan framework kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap dinamika demografis, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan dan keamanan seluruh warga negara sebagai fondasi ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama yaitu belum optimalnya integrasi konsep *human security* dalam kebijakan kependudukan Indonesia, yang berdampak pada lemahnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya nasional. Fenomena ini tercermin dari adanya kesenjangan antara pertumbuhan kuantitatif populasi dengan kualitas implementasi

---

<sup>10</sup> M. Alvi Syahrin dkk., "in Search of Durable Solutions for Refugees in Indonesia: a State Security and Human Rights Protection Approach," *Age of Human Rights Journal* 22, no. 22 (2024): 1–36, <https://doi.org/10.17561/tahrj.v22.8255>.

<sup>11</sup> Achmad dkk., "Taking Advantage Of Indonesia's Demographic Bonus In 2024: Challenges And OpportuniAes Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Di Tahun 2024: Tantangan Dan Peluang."

<sup>12</sup> Utomo dkk., "A second demographic transition in Indonesia?"

perlindungan *human security* yang komprehensif, serta masih terfragmentasinya pendekatan kebijakan kependudukan yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *people-centered security*. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana implementasi konsep *human security* dapat diintegrasikan secara efektif dalam kebijakan kependudukan Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks manajemen populasi yang berkelanjutan?"

Rumusan masalah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sub-pertanyaan penelitian yang meliputi: pertama, bagaimana kondisi existing kebijakan kependudukan Indonesia dalam mengakomodasi prinsip-prinsip *human security*; kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung dalam implementasi *human security* melalui kebijakan kependudukan; dan ketiga, model implementasi seperti apa yang dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan *human security* dalam manajemen populasi Indonesia guna memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model implementasi *human security* dalam kebijakan kependudukan Indonesia yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya nasional melalui pendekatan manajemen populasi yang berkelanjutan. Secara spesifik, penelitian ini ditujukan untuk: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis kondisi existing implementasi konsep *human security* dalam kebijakan kependudukan Indonesia; kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi *human security* dalam konteks manajemen populasi; dan ketiga, merumuskan model implementasi *human security* yang integratif dalam kebijakan kependudukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep *human security* dalam konteks kebijakan kependudukan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi manajemen populasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan keamanan manusia dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah pengembangan body of knowledge tentang integrasi konsep *human security* dalam kebijakan kependudukan, khususnya dalam konteks negara berkembang dengan dinamika demografis yang kompleks seperti Indonesia. Penelitian ini akan menghasilkan kerangka konseptual yang dapat menjadi referensi akademik untuk pengembangan teori manajemen populasi yang berbasis *human-centered approach*, serta memberikan kontribusi pada literature studies tentang hubungan antara kebijakan kependudukan dan ketahanan nasional dalam perspektif keamanan manusia. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi terkait lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan kependudukan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Manfaat praktis lainnya adalah tersedianya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam reformulasi strategi manajemen populasi Indonesia, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sekaligus memitigasi risiko *demographic burden* melalui pendekatan yang mengutamakan keamanan dan kesejahteraan manusia. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup melalui implementasi kebijakan kependudukan yang lebih responsif terhadap kebutuhan keamanan manusia, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global kontemporer.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis implementasi *human security* dalam kebijakan kependudukan Indonesia. Metode studi kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap berbagai konsep teoretis, kebijakan, dan temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat menghasilkan analisis yang komprehensif tentang integrasi *human security* dalam manajemen populasi Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi gap penelitian yang ada dan merumuskan kerangka

konseptual yang inovatif dalam menganalisis hubungan antara kebijakan kependudukan dan keamanan manusia dalam konteks ketahanan nasional.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder yang berasal dari berbagai literatur ilmiah, termasuk artikel jurnal peer-reviewed, buku akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, dan publikasi resmi dari institusi nasional maupun internasional yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria seleksi sumber data meliputi: pertama, publikasi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015-2024 untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi; kedua, sumber data yang memiliki kredibilitas akademik tinggi, baik berupa jurnal terindeks maupun publikasi dari institusi terpercaya; ketiga, sumber data yang membahas aspek-aspek *human security*, kebijakan kependudukan, manajemen populasi, dan ketahanan nasional dalam konteks Indonesia atau negara-negara dengan karakteristik demografis yang serupa; dan keempat, sumber data yang menyediakan perspektif teoretis maupun empiris yang dapat mendukung analisis komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai basis data akademik dan repositori digital, termasuk Google Scholar, JSTOR, ProQuest, Portal Garuda, SINTA (Science and Technology Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ), dan basis data institusional lainnya. Penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang telah ditentukan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, seperti "*human security*", "keamanan manusia", "kebijakan kependudukan", "*population policy*", "manajemen populasi", "*demographic transition*", "ketahanan nasional", "*national resilience*", dan kombinasi dari kata kunci tersebut. Proses penelusuran dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi literatur primer yang paling relevan, kemudian dilanjutkan dengan *snowball sampling* melalui analisis daftar pustaka dari literatur yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi sumber-sumber tambahan yang relevan.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema utama, dan hubungan konseptual yang muncul dari literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan kategorisasi literatur berdasarkan fokus pembahasan, yaitu: konsep *human security*, kebijakan

kependudukan Indonesia, manajemen populasi, dan ketahanan nasional. Selanjutnya, dilakukan coding dan pemberian label tematik untuk mengidentifikasi sub-tema dan dimensi-dimensi spesifik yang muncul dalam setiap kategori. Analisis sintesis dilakukan untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur, mengidentifikasi konsistensi dan inkonsistensi dalam perspektif yang berbeda, serta merumuskan proposisi-proposisi teoretis yang dapat menjadi dasar pengembangan kerangka konseptual penelitian.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber data, dimana informasi dari satu sumber akan diverifikasi dan dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang kredibel untuk memastikan akurasi dan konsistensi data. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *peer debriefing* melalui diskusi dengan ahli-ahli di bidang kebijakan kependudukan dan keamanan manusia untuk memvalidasi interpretasi dan analisis yang dilakukan. Proses dokumentasi yang sistematis dilakukan sepanjang penelitian untuk memastikan transparansi dan *auditability* dari setiap tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penarikan kesimpulan.

Keterbatasan penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan adalah ketergantungan pada ketersediaan dan kualitas literatur yang ada, serta potensi bias publikasi yang dapat mempengaruhi representativitas temuan penelitian. Namun, keterbatasan ini diminimalisir melalui penggunaan berbagai sumber data yang beragam dan penerapan kriteria seleksi sumber yang ketat untuk memastikan kualitas dan relevansi literatur yang digunakan dalam penelitian ini.

## **C. Pembahasan**

### **1. Konsep Human Security Dalam Konteks Kebijakan Kependudukan**

Konsep *human security* telah mengalami transformasi paradigmatik sejak pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* 1994. Evolusi ini menandai pergeseran fundamental dari pendekatan keamanan tradisional yang berpusat pada negara (*state-centric security*) menuju perspektif yang mengutamakan individu dan komunitas sebagai subjek utama keamanan (*people-centered security*). Menurut UNDP, *human security* didefinisikan sebagai keamanan yang berkaitan dengan perlindungan individu dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi, serta

perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan terhadap pola kehidupan sehari-hari<sup>13</sup>. Definisi ini kemudian berkembang menjadi kerangka kerja yang lebih komprehensif yang mencakup tujuh dimensi fundamental: *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security*.

Paradigma *shift* dari *state-centric* menuju *people-centered security* ini memiliki implikasi mendalam terhadap bagaimana kebijakan publik, termasuk kebijakan kependudukan, dirancang dan diimplementasikan. Perubahan perspektif ini mengakui bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak selalu berasal dari konflik antar-negara, melainkan lebih sering muncul dari ketidakamanan ekonomi, degradasi lingkungan, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan politik internal (Khan & Rahman, 2021). Dalam konteks manajemen populasi, pendekatan *human security* menekankan pentingnya memahami dinamika demografis tidak hanya sebagai variabel makroekonomi, tetapi sebagai refleksi dari kondisi keamanan dan kesejahteraan individu serta komunitas. Transformasi ini juga menggarisbawahi urgensi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek perencanaan dan implementasi kebijakan kependudukan.

Korelasi antara keamanan manusia dan dinamika kependudukan merupakan hubungan yang kompleks dan multidimensional, di mana perubahan dalam struktur demografis dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat keamanan individu dan komunitas, begitu pula sebaliknya. *People-centered approach* dalam manajemen populasi mengakui bahwa setiap keputusan demografis—mulai dari keputusan reproduksi, migrasi, hingga partisipasi angkatan kerja—pada dasarnya merupakan respons terhadap kondisi keamanan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh individu dan keluarga<sup>14</sup>. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan kependudukan yang efektif harus mampu memahami dan merespons aspirasi serta kebutuhan keamanan dasar masyarakat, bukan sekadar mencapai target demografis yang telah ditetapkan secara teknokratis.

---

<sup>13</sup> Shahrbanou Tadjbakhsh, "Human Security: Concepts and Implications," *Inequality, Democracy, and the Environment*, 2020, 1–331, <https://doi.org/10.1177/00943061177448051>.

<sup>14</sup> Pauline Kerr, *The evolving dialectic between state-centric and human-centric security*, no. September (2003): 120.

Prinsip *freedom from fear* dan *freedom from want* dalam konteks demografis menghadirkan dimensi baru dalam memahami perilaku kependudukan. *Freedom from fear* berkaitan dengan perlindungan individu dari ancaman kekerasan, diskriminasi, dan ketidakstabilan sosial yang dapat mempengaruhi keputusan reproduksi, pola migrasi, dan struktur keluarga. Sementara itu, *freedom from want* menekankan pentingnya jaminan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial sebagai fondasi bagi masyarakat untuk membuat keputusan demografis yang optimal<sup>15</sup>. Integrasi kedua prinsip ini dalam manajemen populasi memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk menjalani transisi demografis secara alami dan berkelanjutan, tanpa tekanan atau intervensi yang berpotensi melanggar hak-hak fundamental mereka.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 273 juta jiwa, menghadapi tantangan demografis yang unik dan kompleks yang memerlukan pendekatan *human security* yang komprehensif. Karakteristik demografis Indonesia yang ditandai oleh heterogenitas etnis, agama, dan geografis yang luar biasa menciptakan dinamika keamanan manusia yang beragam di berbagai wilayah. Negara kepulauan ini sedang mengalami fase transisi demografis yang krusial, di mana tingkat fertilitas terus menurun sementara struktur usia penduduk bergeser menuju penuaan populasi (*population aging*), menciptakan jendela kesempatan sekaligus tantangan yang memerlukan penanganan strategis<sup>16</sup>.

Tantangan transisi demografis Indonesia semakin kompleks dengan adanya fenomena *second demographic transition* yang ditandai oleh perubahan fundamental dalam pola pembentukan keluarga, peningkatan angka perceraian, penurunan tingkat pernikahan, dan diversifikasi bentuk rumah tangga. Fenomena ini menghadirkan implikasi mendalam terhadap sistem perlindungan sosial, struktur ekonomi, dan kohesi sosial yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif

---

<sup>15</sup> Felix Chikosha dan N Potwana, "Modelling consumer perceptions of green products, purchasing behaviour and loyalty," *Economics, Management and Sustainability* 6, no. 2 (2021): 102–18, <https://doi.org/10.14254/jems.2021.6-2.8>.

<sup>16</sup> Fu-Kuo Liu dan Elpeni Fitrah, "Human Security Policy Initiative on Catastrophic Disaster and Crisis Response in Indonesia," *KnE Social Sciences* 2023 (2023): 43–64, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12816>.

terhadap kebutuhan keamanan manusia <sup>17</sup>. Urgensi integrasi *human security* dalam *sustainable population development* Indonesia menjadi semakin nyata mengingat negara ini harus mampu mengelola bonus demografi yang diprediksi akan berlangsung hingga 2030 sebagai modal pembangunan, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan penuaan populasi yang akan tiba pada dekade-dekade mendatang.

## 2. Kondisi Existing Kebijakan Kependudukan Indonesia

Evolusi kebijakan kependudukan nasional Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak era Orde Baru hingga era reformasi, mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan *top-down* yang rigid menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Kerangka regulasi kependudukan Indonesia saat ini diatur melalui berbagai instrumen hukum, dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai payung hukum utama, yang kemudian dilengkapi dengan berbagai peraturan turunan dan kebijakan sektoral. Institusi pengelola kependudukan melibatkan multiple stakeholders, dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk administrasi kependudukan, Kementerian Kesehatan untuk layanan kesehatan reproduksi, dan berbagai kementerian teknis lainnya.

Program-program utama dalam manajemen populasi Indonesia saat ini mencakup Program Keluarga Berencana (KB) yang telah berevolusi dari program pengendalian kelahiran menjadi program pemberdayaan keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sistem jaminan sosial berbasis demografis, serta berbagai inisiatif pembangunan manusia seperti Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Namun demikian, landscape kebijakan ini masih menunjukkan fragmentasi dalam implementasi, di mana koordinasi antar-institusi belum optimal dan integrasi prinsip *human security* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam desain dan pelaksanaan program <sup>18</sup>.

Dalam dimensi *Economic Security*, Indonesia sedang berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan bonus demografi yang diprediksi

---

<sup>17</sup> Utomo dkk., "A second demographic transition in Indonesia?"

<sup>18</sup> Reny Triwardani, "Is Human Security That Matters? An Analysis Of The Three-Year Report Of Jokowi's Administration On Human Security (HS) Perspective," *Populika* 12, no. 2 (2024): 193–216, <https://doi.org/10.37631/populika.v12i2.1463>.

berlangsung antara tahun 2020-2030, di mana rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berada pada titik terendah dalam sejarah demografis negara ini. Namun, tantangan *demographic burden* versus *demographic dividend* masih menjadi dilema utama, mengingat kualitas sumber daya manusia Indonesia masih belum optimal untuk memanfaatkan jendela kesempatan demografis ini secara maksimal. Integrasi kebijakan ketenagakerjaan dengan manajemen populasi menunjukkan progres positif melalui Program Kartu Prakerja dan berbagai skema pelatihan vokasi, namun masih terdapat ketimpangan dalam distribusi kesempatan kerja yang berkualitas di berbagai wilayah Indonesia <sup>19</sup>.

Dimensi *Community Security* menghadapi tantangan kompleks dalam memelihara kohesi sosial di tengah heterogenitas demografis Indonesia yang luar biasa. Pengelolaan diversifikasi bentuk rumah tangga menjadi semakin penting seiring dengan perubahan pola fertilitas dan pernikahan, di mana tingkat pernikahan dini masih tinggi di beberapa wilayah sementara di wilayah lain terjadi penundaan pernikahan yang signifikan. Adaptasi terhadap perubahan ini memerlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kondisi lokal, tetapi juga mampu mengakomodasi keberagaman nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Dalam aspek *Political Security*, partisipasi politik dalam konteks transisi demografis menunjukkan dinamika yang menarik, di mana generasi muda (*youth bulge*) memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah kebijakan politik, namun masih menghadapi tantangan dalam representasi kepentingan yang efektif. Desentralisasi kebijakan kependudukan memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan inovasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik demografis lokal, namun juga menciptakan risiko disparitas dalam kualitas layanan dan perlindungan hak-hak fundamental masyarakat <sup>20</sup>.

Dimensi *Cultural Security* menghadapi tantangan dalam pelestarian identitas budaya di tengah dinamika kependudukan yang semakin mobile dan terhubung secara global. Akomodasi keberagaman etnis dan agama

---

<sup>19</sup> St Maryam dkk., "Demographic dividend, economic and employment growth in Indonesia," *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 3 (2025): 3365–72, <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.7244>.

<sup>20</sup> Yenny Chandra, *Assessing the Impact of Decentralization on the Quality of Indonesian Democracy*, 2024, 409–30.

dalam kebijakan kependudukan memerlukan pendekatan yang sensitif budaya, sementara pengelolaan konflik berbasis demografis masih memerlukan strengthening kapasitas institusional dan pengembangan mekanisme *early warning system* yang lebih efektif.

Kesenjangan implementasi *people-centered security* dalam kebijakan kependudukan Indonesia masih cukup signifikan, terutama dalam hal responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Fragmentasi pendekatan kebijakan kependudukan tercermin dari lemahnya koordinasi antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan, yang mengakibatkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya dan overlapping program yang tidak produktif. Keterbatasan integrasi sistem perlindungan sosial menjadi tantangan utama dalam mewujudkan *freedom from want* bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana masih terdapat gaps dalam cakupan (*coverage*) dan kecukupan (*adequacy*) sistem jaminan sosial nasional <sup>21</sup>.

### 3. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor struktural yang mendukung implementasi *human security* dalam kebijakan kependudukan Indonesia mencakup sistem perlindungan sosial formal dan informal yang telah mengalami perkembangan signifikan dalam dekade terakhir. Kapasitas institusional dalam manajemen populasi menunjukkan peningkatan melalui berbagai reformasi birokrasi dan penguatan sistem informasi kependudukan, sementara kerangka hukum yang mendukung hak-hak fundamental telah mengalami evolusi positif melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional. Faktor kontekstual yang menguntungkan meliputi momentum bonus demografi sebagai *window of opportunity* untuk akselerasi pembangunan manusia, heterogenitas demografis sebagai modal sosial yang dapat dioptimalkan untuk inovasi dan kreativitas, serta komitmen politik terhadap pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam adopsi Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kerangka pembangunan nasional <sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> K. Kusnanto dkk., *Demographic Transition and Economic Challenges: A Descriptive Study of Economic Resilience*, no. Shimba (Atlantis Press SARL, 2023), [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0\\_17](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0_17).

<sup>22</sup> Safina Meilia dan Universitas Katolik Parahyangan, *DEMOGRAPHIC BONUS TO SUPPORT ECONOMIC*, 5, no. 2 (2025): 1856–63.

Tantangan struktural utama terletak pada keterbatasan kapasitas *adaptive population governance*, di mana sistem governance belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika demografis yang cepat dan kompleks. Kompleksitas koordinasi antar-institusi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan yang terintegrasi, sementara gap dalam kerangka regulasi *human security* menciptakan ruang ambiguitas dalam implementasi di tingkat operasional. Tantangan implementasi mencakup resistensi terhadap *paradigm shift* dari pendekatan konvensional menuju *people-centered approach*, keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis untuk mengoperasionalkan konsep *human security* dalam konteks praktis, serta konflik kepentingan antar-stakeholder yang dapat menghambat sinergi kebijakan. Tantangan eksternal meliputi dampak perubahan iklim terhadap dinamika kependudukan, volatilitas ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas sosial, serta isu pengungsi dan pencari suaka yang memerlukan penanganan khusus dalam kerangka *human security*.

Indonesia menghadapi paradoks pembangunan yang unik, di mana pertumbuhan ekonomi sering kali bertabrakan dengan prinsip keamanan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam kasus ekspansi perkebunan kelapa sawit yang memberikan dampak ekonomi positif namun mengancam keberlanjutan ekosistem dan keamanan lingkungan masyarakat lokal. Dilema kebebasan dan pembatasan dalam konteks masyarakat Muslim mayoritas memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai agama sambil tetap menjunjung tinggi hak-hak individual dan kebebasan reproduksi. Kompleksitas penerapan prinsip *non-refoulement* untuk pengungsi mencerminkan tantangan Indonesia sebagai negara transit sekaligus tujuan migrasi internasional, yang memerlukan keseimbangan antara komitmen kemanusiaan internasional dengan kapasitas nasional dalam mengelola arus migrasi <sup>23</sup>.

#### **4. Model Implementasi Human Security Yang Integratif**

Kerangka konseptual model integratif *human security* dalam kebijakan kependudukan Indonesia dibangun atas fondasi prinsip-prinsip dasar *adaptive population governance* yang mengakui dinamika demografis sebagai sistem kompleks yang memerlukan pendekatan governance yang

---

<sup>23</sup> Abrori Charliene, *Challenges And Opportunities In Responding To Refugee And Asylum Seeker Entering Indonesian Territory In The Context Of Implementing Law Number 37 Year 1999 Concerning Foreign Relations*, 43, no. 1 (2023): 97–102.

fleksibel dan responsif. *Adaptive population governance* menekankan pentingnya kapasitas institusional untuk beradaptasi dengan perubahan demografis yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya, sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip *human security* sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan. Model ini mengintegrasikan pembelajaran dari berbagai pengalaman internasional dalam mengelola transisi demografis, dengan penyesuaian terhadap konteks sosio-budaya dan politik Indonesia yang unik <sup>24</sup>.

Integrasi horizontal dan vertikal dalam implementasi kebijakan menjadi pilar utama model ini, di mana integrasi horizontal mengacu pada koordinasi lintas-sektor dan lintas-institusi di tingkat yang sama, sementara integrasi vertikal menekankan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. *Multi-stakeholder approach* dalam manajemen populasi mengakui bahwa implementasi *human security* yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sinergi yang lebih kuat dalam implementasi kebijakan, sekaligus memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan dapat diakomodasi secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.

Dimensi kelembagaan model implementasi mengusulkan restrukturisasi institusi pengelola kependudukan melalui pembentukan *National Human Security and Population Council* yang berfungsi sebagai koordinator utama dalam implementasi kebijakan kependudukan berbasis *human security*. Mekanisme koordinasi lintas-sektoral dirancang melalui sistem *inter-ministerial coordination committee* yang memiliki mandat untuk memastikan sinergi antara kebijakan kependudukan dengan sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis *human security indicators* dikembangkan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan, dengan indikator-indikator yang mencakup tidak hanya aspek kuantitatif demografis, tetapi juga aspek kualitatif yang terkait dengan tingkat keamanan dan kesejahteraan masyarakat <sup>25</sup>.

Dimensi kebijakan mencakup reformulasi strategi manajemen populasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *human security* dalam setiap tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Integrasi *human security* dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui mainstreaming konsep ini dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Harmonisasi regulasi nasional dan daerah menjadi prioritas untuk memastikan konsistensi implementasi *human security* di seluruh wilayah Indonesia, dengan pengembangan standar minimal layanan yang harus dipenuhi oleh setiap daerah dalam menyelenggarakan program-program kependudukan.

Dimensi operasional mengembangkan program-program inovatif berbasis *community-centered approach* yang memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan solusi terhadap tantangan demografis yang mereka hadapi. Sistem *early warning* untuk ancaman *human security* dirancang sebagai mekanisme

---

<sup>24</sup> Bambang Brodjonegoro dan Shinji Asanuma, "Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia," *Hitotsubashi Journal of Economics* 41 (Desember 2000).

<sup>25</sup> Maryam dkk., "Demographic dividend, economic and employment growth in Indonesia."

antisipasi terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam keamanan manusia, mulai dari bencana alam, krisis ekonomi, hingga konflik sosial yang dapat berdampak pada dinamika kependudukan. Mekanisme responsif terhadap krisis demografis dikembangkan melalui pembentukan *rapid response team* yang siap memberikan bantuan teknis dan dukungan kebijakan kepada daerah-daerah yang mengalami guncangan demografis mendadak <sup>26</sup>.

Fase transisi dalam jangka pendek (1-3 tahun) difokuskan pada penguatan kapasitas institusional melalui program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang memahami konsep dan praktik implementasi *human security* dalam konteks kependudukan. *Pilot project* implementasi *human security* akan dilaksanakan di beberapa daerah terpilih yang mewakili karakteristik demografis yang beragam, dengan tujuan untuk menguji efektivitas model dan mengidentifikasi tantangan implementasi yang perlu diantisipasi. Sosialisasi dan *capacity building* dilakukan secara masif untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang konsep *human security* dan implikasinya terhadap kebijakan kependudukan.

Fase konsolidasi dalam jangka menengah (3-7 tahun) merupakan tahap *scale-up* implementasi model ke seluruh wilayah Indonesia, dengan dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang telah teruji dalam fase sebelumnya. Evaluasi dan penyesuaian strategi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa model implementasi tetap relevan dengan perkembangan kondisi demografis dan sosio-ekonomi Indonesia. Penguatan sistem monitoring dilakukan melalui pengembangan *dashboard* elektronik yang memungkinkan real-time monitoring terhadap berbagai indikator *human security* di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota <sup>27</sup>.

Fase sustainabilitas dalam jangka panjang (7-15 tahun) bertujuan untuk mencapai institutionalisasi pendekatan *human security* dalam seluruh aspek governance kependudukan Indonesia. *Continuous improvement* dan adaptasi dilakukan melalui mekanisme pembelajaran organisasi yang memungkinkan sistem untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang muncul. *Knowledge sharing* dan replikasi model diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik *human security* di negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki karakteristik demografis yang serupa dengan Indonesia.

## 5. Implikasi Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Implementasi *human security* dalam kebijakan kependudukan Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan ekonomi melalui optimalisasi *demographic dividend* yang direncanakan akan berlangsung hingga 2030. *Human security approach* memungkinkan pemanfaatan bonus demografi yang lebih optimal melalui

---

<sup>26</sup> Charliene, *Challenges And Opportunities In Responding To Refugee And Asylum Seeker Entering Indonesian Territory In The Context Of Implementing Law Number 37 Year 1999 Concerning Foreign Relations*.

<sup>27</sup> Penerapan Prinsip-prinsip Shahnaaz dkk., *Implementation of Good Corporate Governance Principles in Pt .*, 2024, 1138–53, <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>.

investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Mitigasi risiko *demographic burden* dilakukan melalui strategi yang mengantisipasi tantangan penuaan populasi, dengan fokus pada pengembangan sistem pensiun yang berkelanjutan dan layanan kesehatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan populasi lanjut usia <sup>28</sup>. *Sustainable economic growth* berbasis keamanan manusia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar target kuantitatif, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip *inclusive growth* dengan strategi manajemen populasi yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai tingkat ekonomi dan wilayah geografis.

Penguatan ketahanan sosial melalui implementasi *human security* dalam kebijakan kependudukan dilakukan melalui penguatan kohesi sosial dalam konteks diversitas demografis yang menjadi ciri khas Indonesia. Sistem perlindungan sosial yang adaptif dikembangkan untuk dapat merespons berbagai bentuk kerentanan sosial yang dapat muncul dalam proses transisi demografis, termasuk kerentanan yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan populasi lanjut usia. *Community empowerment* dan *social capital building* menjadi strategi utama dalam membangun resiliensi sosial, dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pelestarian ketahanan budaya dalam era globalisasi menjadi tantangan khusus bagi Indonesia yang memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Implementasi *human security* dalam kebijakan kependudukan memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian identitas budaya melalui pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak budaya masyarakat dalam membuat keputusan demografis. Manajemen konflik berbasis kearifan lokal dikembangkan sebagai mekanisme untuk mengelola potensi konflik yang dapat muncul akibat perubahan demografis, dengan memanfaatkan nilai-nilai dan institusi tradisional

---

<sup>28</sup> Satya Fahreza, "Implikasi Konsep Wawasan Nusantara Terhadap Ketahanan Nasional Pada Aspek Sosial Budaya di Era Globalisasi," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6 (April 2024): 1–6, <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v6i1.5066>.

yang telah terbukti efektif dalam memelihara harmoni sosial. *Cultural adaptation strategies* dalam transisi demografis dirancang untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan demografis tanpa kehilangan identitas budaya mereka <sup>29</sup>.

*Interconnectedness* antara ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dalam implementasi *human security* menciptakan efek sinergis yang memperkuat keseluruhan sistem ketahanan nasional Indonesia. *Multiplier effect* dari implementasi *human security* dalam kebijakan kependudukan tidak hanya berdampak pada sektor demografis, tetapi juga pada berbagai sektor pembangunan lainnya, menciptakan siklus positif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. *Sustainable national development framework* yang mengintegrasikan ketiga pilar ketahanan ini memberikan fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan demografis dan sosio-ekonomi di masa depan.

## **6. Rekomendasi Kebijakan Dan Strategi Implementasi**

Rekomendasi untuk pemerintah pusat mencakup reformulasi *grand strategy* manajemen populasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *human security* sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan kependudukan nasional. Penguatan koordinasi lintas-kementerian dilakukan melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang memiliki kewenangan eksekutif untuk memastikan sinergi implementasi kebijakan. Alokasi anggaran berbasis *human security priorities* mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan program-program yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan keamanan manusia dalam konteks kependudukan. Rekomendasi untuk pemerintah daerah menekankan pentingnya adaptasi kebijakan sesuai dengan karakteristik demografis dan sosio-budaya lokal, dengan tetap mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip *human security* universal. Penguatan kapasitas manajemen populasi daerah dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. *Community engagement* dalam implementasi program menjadi kunci keberhasilan implementasi *human security* di tingkat lokal, dengan memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap implementasi kebijakan.

---

<sup>29</sup> Elizabeth Ferris dan Sanjula Weerasinghe, "Promoting Human Security: Planned Relocation as a Protection Tool in a Time of Climate Change," *Journal on Migration and Human Security* 8, no. 2 (2020): 134–49, <https://doi.org/10.1177/2331502420909305>.

*Timeline* dan *milestone* implementasi dirancang dalam tiga fase yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan *key performance indicators* (KPIs) yang spesifik untuk setiap fase. *Risk management* dan *contingency planning* dikembangkan untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam proses implementasi, termasuk resistensi politik, keterbatasan anggaran, dan perubahan kondisi sosio-ekonomi yang tidak terduga. Pengembangan *Human Security Index* untuk Indonesia menjadi instrumen utama dalam monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan kependudukan berbasis *human security*. *Participatory monitoring system* memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses monitoring dan memberikan masukan terhadap implementasi kebijakan. *Regular assessment* dan *feedback mechanism* dirancang untuk memastikan bahwa sistem implementasi dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

#### **D. Penutup**

Implementasi human security dalam kebijakan kependudukan Indonesia menunjukkan bahwa integrasi konsep people-centered security merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya nasional. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi dan institusional yang memadai dalam manajemen populasi, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip human security secara komprehensif. Kondisi existing kebijakan kependudukan Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi freedom from fear dan freedom from want, yang tercermin dari fragmentasi pendekatan kebijakan, lemahnya koordinasi lintas-sektor, dan keterbatasan sistem perlindungan sosial yang adaptif. Faktor-faktor struktural seperti kapasitas adaptive population governance yang terbatas, kompleksitas koordinasi antar-institusi, dan resistensi terhadap paradigm shift menjadi hambatan utama dalam implementasi human security yang efektif.

Model implementasi human security yang integratif melalui pendekatan adaptive population governance terbukti dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi demographic dividend dan mitigasi risiko demographic burden. Implementasi model ini dalam jangka pendek, menengah, dan panjang memiliki implikasi positif terhadap penguatan ketahanan ekonomi melalui sustainable economic growth

berbasis keamanan manusia, ketahanan sosial melalui community empowerment dan social capital building, serta ketahanan budaya melalui pelestarian identitas budaya dalam era globalisasi. Interconnectedness antara ketiga pilar ketahanan ini menciptakan multiplier effect yang memperkuat keseluruhan sistem ketahanan nasional Indonesia, memberikan fondasi kokoh untuk menghadapi tantangan demografis dan sosio-ekonomi masa depan dalam kerangka sustainable national development.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Achmad, Willya, Nunung Nurwae, Muhammad Fedryansyah, dkk. "Taking Advantage Of Indonesia's Demographic Bonus In 2024: Challenges And OpportuniAes Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Di Tahun 2024: Tantangan Dan Peluang." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 2 (2024): 4425–34.
- Ardiyanti, Dwi, dan Ahmad Anwar. "The Dilemma of Human Security on Palm Oil Plantation in Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.18196/hi.71125>.
- Brodjonegoro, Bambang, dan Shinji Asanuma. "Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia." *Hitotsubashi Journal of Economics* 41 (Desember 2000).
- Chandra, Yenny. *Assessing the Impact of Decentralization on the Quality of Indonesian Democracy*. 2024, 409–30.
- Charliene, Abrori. *Challenges And Opportunities In Responding To Refugee And Asylum Seeker Entering Indonesian Territory In The Context Of Implementing Law Number 37 Year 1999 Concerning Foreign Relations*. 43, no. 1 (2023): 97–102.
- Chikosha, Felix, dan N Potwana. "Modelling consumer perceptions of green products, purchasing behaviour and loyalty." *Economics, Management and Sustainability* 6, no. 2 (2021): 102–18. <https://doi.org/10.14254/jems.2021.6-2.8>.
- Fahreza, Satya. "Implikasi Konsep Wawasan Nusantara Terhadap Ketahanan Nasional Pada Aspek Sosial Budaya di Era Globalisasi." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6 (April 2024): 1–6. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v6i1.5066>.
- Ferris, Elizabeth, dan Sanjula Weerasinghe. "Promoting Human Security: Planned Relocation as a Protection Tool in a Time of Climate Change." *Journal on Migration and Human Security* 8, no. 2 (2020): 134–49. <https://doi.org/10.1177/2331502420909305>.
- Kerr, Pauline. *The evolving dialectic between state-centric and human-centric security*. no. September (2003): 120.

- Kusnanto, K., Arthur Josias Simon Runturambi, dan Muhammad Syaroni Rofii. *Demographic Transition and Economic Challenges: A Descriptive Study of Economic Resilience*. no. Shimba. Atlantis Press SARL, 2023. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0\\_17](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0_17).
- Liu, Fu-Kuo, dan Elpeni Fitrah. "Human Security Policy Initiative on Catastrophic Disaster and Crisis Response in Indonesia." *KnE Social Sciences* 2023 (2023): 43–64. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12816>.
- Mardhani, Dewie, Arthur Josias Simon Runturambi, dan Margaretha Hanita. "Security and Defense in National Resilience Studies To Realize a National Security System." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 10, no. 3 (2020): 267. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.1112>.
- Maryam, St, Hailuddin Hailuddin, dan Endri Endri. "Demographic dividend, economic and employment growth in Indonesia." *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 3 (2025): 3365–72. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.7244>.
- Meilia, Safina, dan Universitas Katolik Parahyangan. *DEMOGRAPHIC BONUS TO SUPPORT ECONOMIC*. 5, no. 2 (2025): 1856–63.
- Rif'ah, Erwin Nur. "Freedom or Restraint: Redefining the Concept of Human Security within the Indonesian Muslim Community." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 1, no. 2 (2018): 192. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v1i2.6131>.
- Shahnaaz, Penerapan Prinsip-prinsip, Amrila Sani, M Si, dkk. *Implementation of Good Corporate Governance Principles in Pt .* 2024, 1138–53. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>.
- Surtiari, Gusti Ayu Ketut, Mia Wannewitz, Puguh Prasetyoputra, Tiodora Hadumaon Siagian, dan Matthias Garschagen. "Indonesia's social protection system: the relevance of informal social protection to strengthen adaptation to climate change." *Journal of Integrative Environmental Sciences* 21, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/1943815X.2024.2375995>.
- Syahrin, M. Alvi, M. Rafly Qalandy, dan M. Syaran Jafizhan. "in Search of Durable Solutions for Refugees in Indonesia: a State Security and Human Rights Protection Approach." *Age of Human Rights Journal* 22, no. 22 (2024): 1–36. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v22.8255>.
- Tadjbakhsh, Shahrbanou. "Human Security: Concepts and Implications." *Inequality, Democracy, and the Environment*, 2020, 1–331. <https://doi.org/10.1177/00943061177448051>.
- Triwardani, Reny. "Is Human Security That Matters? An Analysis Of The Three-Year Report Of Jokowi's Administration On Human Security (HS) Perspective." *Populika* 12, no. 2 (2024): 193–216. <https://doi.org/10.37631/populika.v12i2.1463>.
- Utomo, Ariane, Aris Ananta, Diahhadi Setyonaluri, dan Calvin Aryaputra. "A second demographic transition in Indonesia?" *China Population and Development Studies* 6, no. 3 (2022): 288–315. <https://doi.org/10.1007/s42379-022-00115-y>.